

Regulasi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Buruh di Indonesia

Jurnal Integritas:

- Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi
- Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Sebuah model usulan

Koleksi Buku Bulan Ini:

- Perlindungan Konsumen : Melalui Arbitase di Indonesia
- Hukum Adat 1: Konsep, Sejarah, Perkembangan, dan Perlindungannya di Indonesia
- Hukum Adat 2 Konsep, Teori, dan Penetapan Hukum Adat di Indonesia
- Tata Kelola Keuangan Perspektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi
- Mengawal Demokrasi Konstitusional

Regulasi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Buruh di Indonesia

Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Pekerja/Buruh di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Regulasi ini terus beradaptasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Setiap periode membawa perubahan baru yang berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh dan menyesuaikan dengan perkembangan global, memastikan bahwa hak-hak dan atau kewenangan pekerja/Buruh terpenuhi dan terlindungi dalam berbagai kondisi.

Memasuki era Orde Baru, pemerintah memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Regulasi ketenagakerjaan diperketat untuk menciptakan stabilitas dan menarik investasi asing. Salah satu produk hukum penting pada masa ini adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan. Namun, kebebasan berserikat dan hak-hak buruh lainnya sering kali dikendalikan secara ketat demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Selanjutnya, era reformasi membawa perubahan besar dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu produk hukum terpenting yang memberikan perlindungan komprehensif bagi buruh, termasuk hak untuk berserikat, berunding, dan mendapatkan upah yang layak. Di era modern, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan baru.

Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya melindungi hak-hak buruh. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, pengusaha, dan buruh sendiri untuk terus memperjuangkan regulasi yang adil dan manusiawi. Hanya dengan demikian,



perlindungan hak-hak buruh dapat terjamin dalam menghadapi berbagai dinamika masa depan.

Buku "Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Pekerja/Buruh di Indonesia" merupakan sebuah karya yang dituliskan oleh Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum menyajikan analisis mendalam tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional pekerja. Menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, buku ini menguraikan perkembangan regulasi ketenagakerjaan dari masa kolonial hingga era modern. Buku ini lebih berfokus pada konteks Indonesia, dengan sedikit referensi pada praktik internasional yang bisa memperkaya analisis. Dibalik kekurangan dan kelebihan pada buku ini, buku ini sangat layak untuk dibaca oleh semua kalangan. Mau tau lebih dalam tentang buku ini? Temukan buku ini di Perpustakaan KPK!

Penulis : Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum
Penerbit : PT RajaGrafindo Persada
Tahun Terbit : 2021
Tebal Buku : 234

Vol. 9 No.2 Tahun 2023

Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi

Systematic literature review: The implementation of anti-corruption value insertion in schools and universities



Korupsi menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia. Sehingga semua pihak harus ikut andil dalam menemukan solusi untuk masalah ini, tidak hanya melalui tindakan represif tetapi juga preventif. Disinilah pendidikan harus ikut ambil bagian sebagai media pembentukan karakter. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara, mulai dari kegiatan akademik sampai nonakademik. Systematic literature review akan diaplikasikan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mereviu dan menganalisis artikel terkait implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara. Penelitian ini menggunakan 44 kumpulan artikel yang diterbitkan dalam tujuh tahun terakhir. Terdapat beberapa contoh penyisipan nilai antikorupsi melalui berbagai mekanisme. Ada beberapa cara dalam menyemai nilai antikorupsi, antara lain: integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah, penggunaan metode pembelajaran, kegiatan nonakademik, dan manajemen atau pengelolaan pendidikan berdasarkan nilai antikorupsi. Sudah banyak pihak yang ikut terlibat dalam tindakan preventif melawan korupsi. Sehingga diharapkan usaha ini mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi.

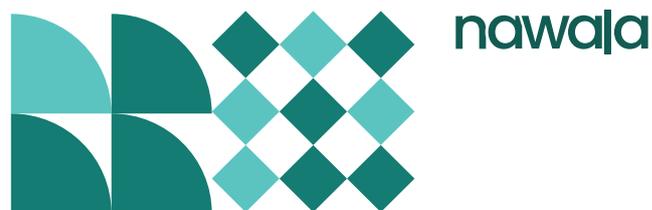
Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Sebuah model usulan

Immunity rights for officials of the Corruption Eradication Commission (KPK): A proposed model



Serangan terhadap KPK melalui orang-orang yang ada di dalamnya sudah sering terjadi. Serangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK ataupun mungkin balas dendam. Seharusnya mereka dalam melaksanakan tugasnya, mendapatkan perlindungan hukum, yaitu hak imunitas terbatas. Hak imunitas terbatas bukanlah hal baru di Indonesia, undang-undang telah memberikannya kepada beberapa lembaga/instansi negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menawarkan alternatif formulasi pengaturan hak imunitas terbatas bagi KPK. Tulisan ini mengusulkan model hak imunitas terbatas bagi pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Model yang diusulkan mengatur bahwa pejabat KPK tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, dan digugat selama menjalankan jabatannya. Namun, hak imunitas tersebut dibatasi hanya selama menduduki jabatan di KPK dan tidak berlaku jika pejabat KPK mendapatkan sanksi berat atas pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana khusus.

Koleksi Bulan Ini!



Perlindungan Konsumen : Melalui Arbitrase di Indonesia

Memberikan pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, terutama melalui jalur arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan putusan arbitrase.

01



Hukum Adat 1: Konsep, Sejarah, Perkembangan, dan Perlindungannya di Indonesia

Menguraikan konsep-konsep dasar hukum adat beserta sifatnya yang khas, dilengkapi dengan uraian historis perkembangan hukum adat dari masa ke masa serta dasar hukum dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

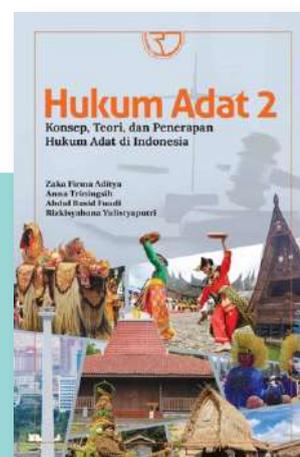
02



Hukum Adat 2 Konsep, Teori, dan Penetapan Hukum Adat di Indonesia

Menjelaskan tentang sistem kekerabatan yang dianut masyarakat hukum adat di Indonesia serta menguraikan pula akibat hukum dari masing masing sistem kekerabatan bagi pengaturan bidang hukum lainnya.

03





04



Tata Kelola Keuangan Perspektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Menjelaskan tentang upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antardaerah setelah berlakunya sistem otonomi daerah seperti menekankan penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan pajak, administrasi, dan anggaran untuk meningkatkan pelayanan.

05



Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi

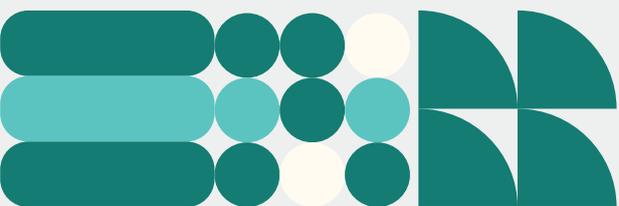
Karya ini berisi analisa terhadap beberapa Putusan MK yang menggunakan Pancasila sebagai salah satu dasar pertimbangan memutus permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan MK.

06



Mengawal Demokrasi Konstitusional

Literatur ini menggambarkan bagaimana setiap hakim diberi kebebasan berpendapat dalam menerapkan Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) namun senantiasa tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK.



nawaja

Edisi 05, Vol.09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK
Scan untuk informasi lebih lanjut

